

# Hasil Survei terhadap Ekonom terkait Kebijakan saat Krisis Covid-19

**Pendahuluan.** Statistik harian menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Jumlah kasus terinfeksi Covid-19 mencapai 1.677 sampai dengan Rabu 1 April 2020, dengan penambahan kasus positif terinfeksi harian melebihi 100 pasien. Karena jumlah pengetesan per 1,000 penduduk relatif kecil, maka kita perlu antisipasi bahwa untuk setiap 3 kasus terkonfirmasi positif terdapat 97 kasus positif yang berpotensi tidak terdeteksi. Selain itu diperkirakan jumlah kasus positif terinfeksi akan meningkat dengan tajam mulai awal hingga pertengahan April 2020. Peningkatan tajam jumlah kasus akan memberikan tekanan kepada sistem kesehatan, dan menyebabkan jumlah kehilangan jiwa yang melonjak, di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

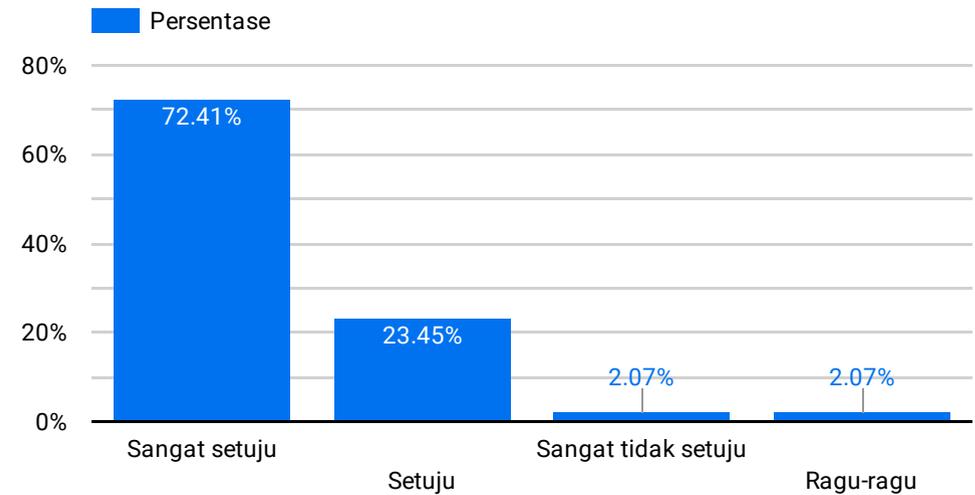
Oleh karena itu, intervensi kesehatan masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan (KK), atau karantina wilayah (KW) perlu menjadi kebijakan prioritas yang dipertimbangkan oleh Pemerintahan. Namun, muncul kekhawatiran baik dari pengambil kebijakan di pemerintahan dan masyarakat terkait penerapan kebijakan PSBB, KK, dan KW. Terutama kekhawatiran akan dampak ekonomi yang lebih buruk seandainya kebijakan tersebut diterapkan dibandingkan dampak ekonomi seandainya kebijakan tersebut tidak diterapkan. Karenanya perlu diketahui seberapa buruk dampak ekonomi dari PSBB, KK dan KW di Indonesia. Kalaupun buruk, perlu juga diketahui apakah kegiatan PSBB, KK dan KW ini tetap perlu dilaksanakan.

**Tujuan survei.** Kami melakukan survei diantara para ekonom untuk mengetahui pendapat mereka tentang kebijakan PSBB, KK, atau KW dan dampaknya terhadap ekonomi. Ekonom dianggap dapat melakukan proyeksi dampak penerapan intervensi kebijakan kesehatan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia. Mereka pula dapat memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB, KK atau KW tetap perlu dilaksanakan. Survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintahan pusat dan daerah seandainya pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, KK, atau KW.

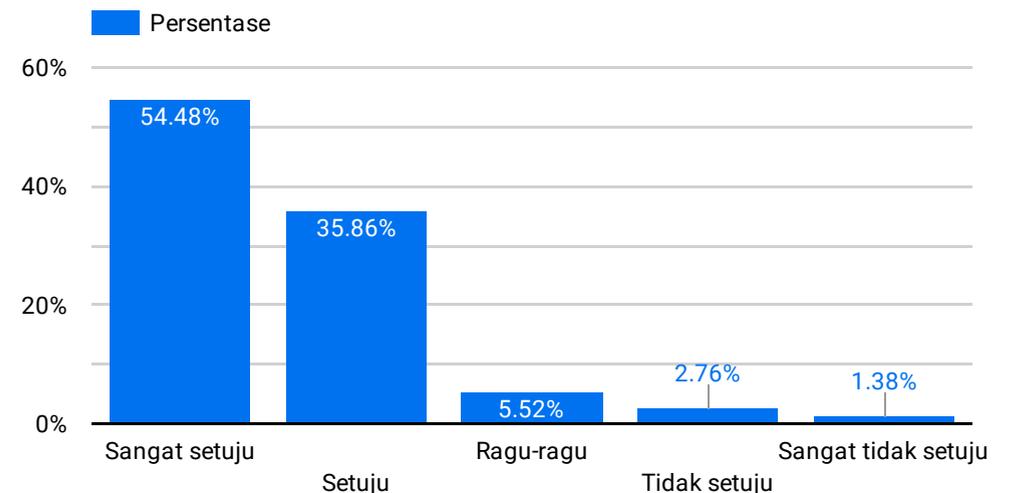
**Metode survei.** Responden survei adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi akademisi di bidang ekonomi atau ekonom profesional di dalam dan di luar negeri yang bergelar Master atau Doktor. Pertama, kami mengirimkan undangan kepada individu-individu yang memenuhi kriteria tersebut untuk berpartisipasi. Individu tersebut kemudian mengisi nama dan alamat surat elektronik di Google Form. Individu yang telah mendaftar menjadi calon responden. Kami kemudian mengirimkan tautan survei ke calon responden melalui surat elektronik. Calon responden dapat mengisi survei pada hari Selasa 31 Maret 2020 mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00 WIB.

Kami menganalisis jawaban dari 145 responden yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu ekonomi (66.90%), studi pembangunan (14.48%), dan kebijakan publik (18.62%). Sebagian besar responden adalah akademisi di dalam (33.79%) maupun luar negeri (2.76%) sedangkan sisanya adalah ekonom profesional dari lembaga peneliti hingga pemerintahan dan mahasiswa pascasarjana. Kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintahan seandainya PSBB, KK, dan KW diterapkan

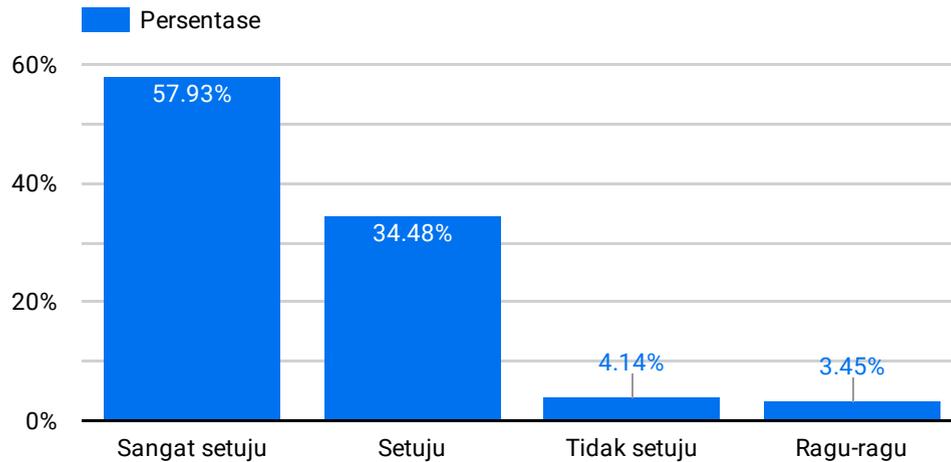
**Pernyataan A:** Kebijakan yang komprehensif untuk mencegah penyebaran virus korona untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan manusia perlu diambil dengan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memang akan berkurang secara signifikan dalam jangka pendek.



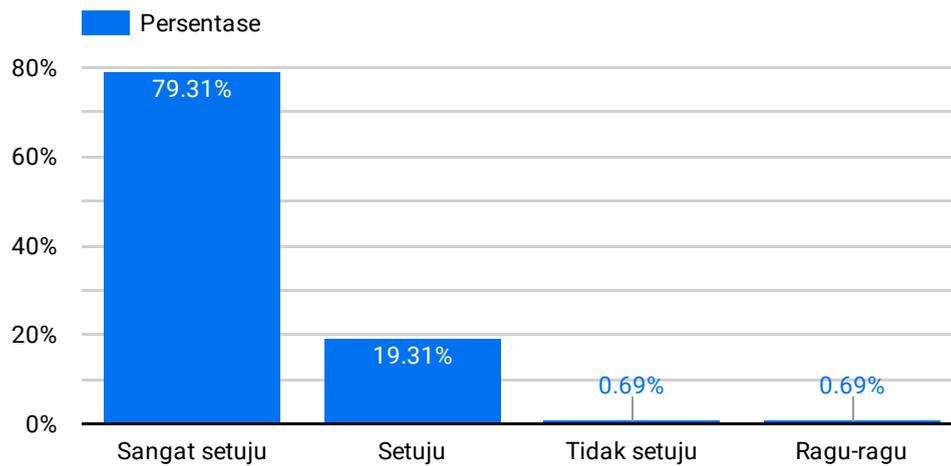
**Pernyataan B:** Mengabaikan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan pergerakan manusia dalam situasi resiko penyebaran infeksi tinggi akan membawa kerusakan ekonomi yang lebih besar dibandingkan jika kebijakan tersebut diterapkan.



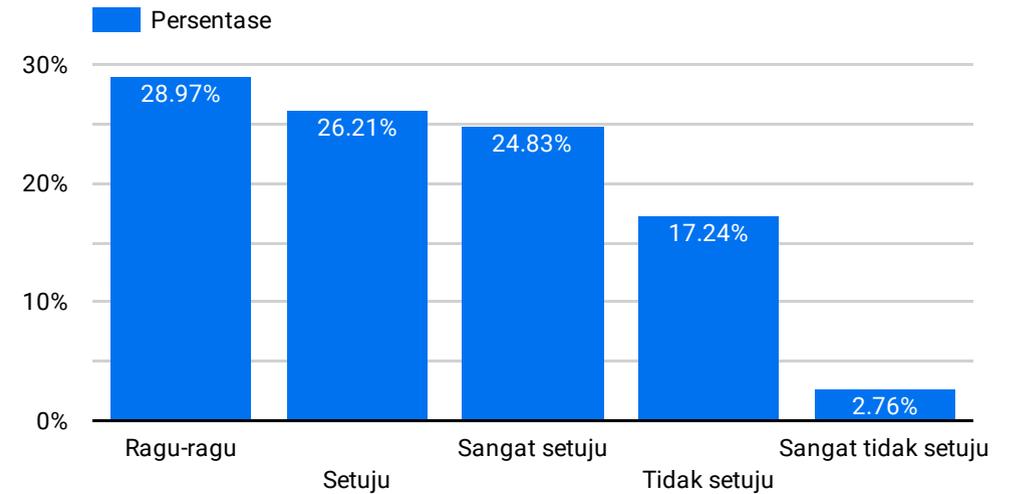
**Pernyataan C:** Langkah pemerintah yang optimal saat ini adalah berinvestasi lebih besar untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan melalui pembangunan RS sementara, peningkatan intensitas uji massal, peningkatan produksi ventilator serta APD (Alat Pelindung Diri) esensial, serta pemberian insentif untuk tenaga medis.



**Pernyataan D:** Jaminan ketersediaan logistik dan perlindungan sosial kelompok rentan secara jelas harus diumumkan bersamaan dengan ketetapan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan pergerakan manusia untuk mengurangi kecemasan masyarakat.



**Pernyataan E:** Dalam rangka memobilisasi sumber daya secara masif dan efisien, dibutuhkan lembaga independen yang menggantikan peran satgas Covid-19 dan berada langsung di bawah Presiden sebagai koordinator pada saat dan setelah pelaksanaan karantina wilayah.

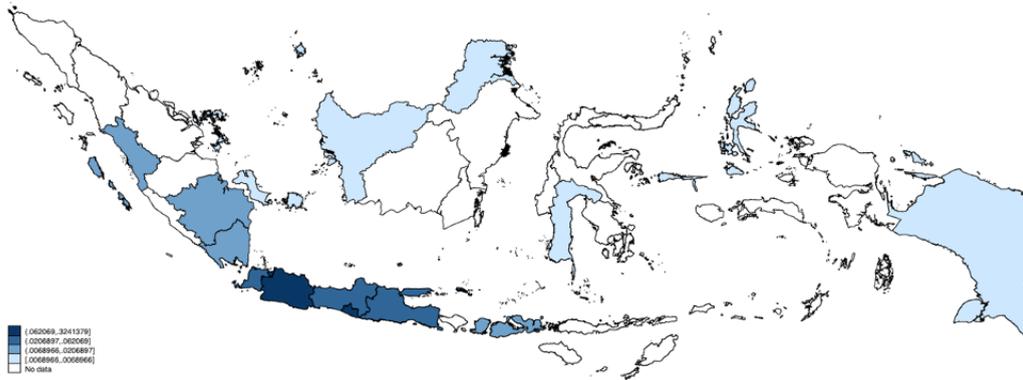


**Pernyataan F:** Kebijakan ekonomi apakah yang pemerintah Indonesia perlu segera terapkan pada masa penerapan kebijakan karantina wilayah selain kebijakan penjaminan logistik dan jaminan sosial?

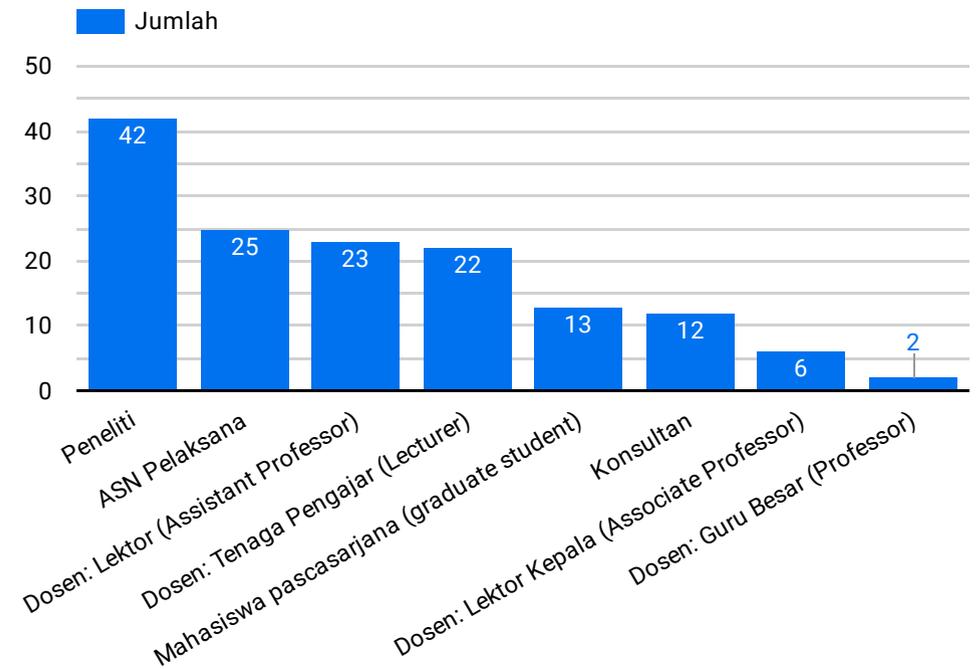
Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa jaring perlindungan sosial adalah kebijakan yang perlu diterapkan jika pemerintah menerapkan PSBB, KK, atau KW. Bentuk jaring perlindungan sosial meliputi, namun tidak terbatas pada, bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, hingga subsidi listrik. Kebijakan ini melindungi masyarakat miskin, masyarakat rentan, pekerja harian lepas, pekerja di sektor informal, hingga pengemudi ojol. Ekonom juga berpendapat bahwa kebijakan untuk sektor kesehatan penting untuk diterapkan saat PSBB, KK, atau KW.

Kebijakan lain yang direkomendasikan oleh ekonom adalah penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak dan relaksasi kredit, baik untuk sektor rumah tangga dan sektor bisnis.

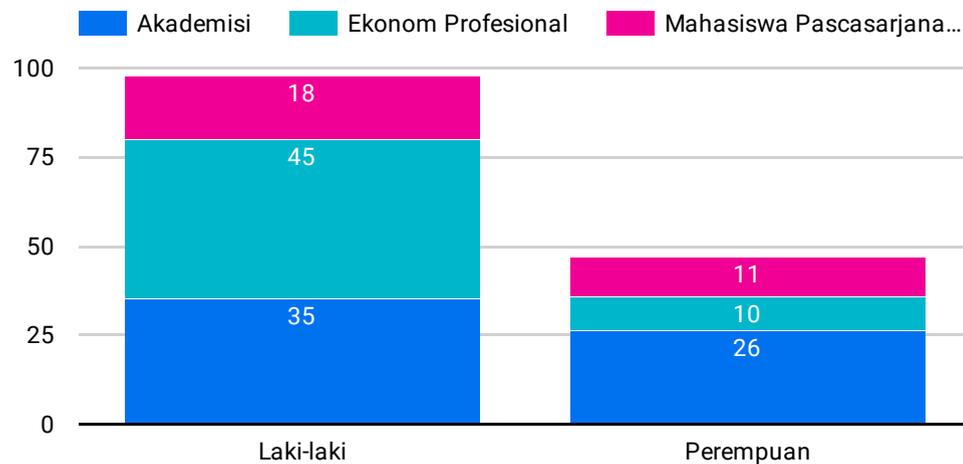
**Peta sebaran responden menurut provinsi, dalam % (18 responden WNI berdomisili di luar negeri)**



**Posisi responden di lembaga**



**Jender dan bidang pekerjaan responden**



**Tim Penyusun**

Rizki Nauli Siregar, UC Davis, email: [rsiregar@ucdavis.edu](mailto:rsiregar@ucdavis.edu)  
 Rus'an Nasrudin Ph.D., UI, email: [r.nasrudin@ui.ac.id](mailto:r.nasrudin@ui.ac.id)  
 Gumilang Aryo Sahadewo Ph.D., UGM, email: [gasahadewo@ugm.ac.id](mailto:gasahadewo@ugm.ac.id)  
 Rizal Shidiq Ph.D., Leiden University, email: [a.r.shidiq@hum.leidenuniv.nl](mailto:a.r.shidiq@hum.leidenuniv.nl)  
 M. Halley Yudhistira Ph.D., UI, email: [m.halley@ui.ac.id](mailto:m.halley@ui.ac.id)  
 Muhammad Hanri Ph.D., UI, email: [muhhammad.hanri06@ui.ac.id](mailto:muhhammad.hanri06@ui.ac.id)  
 Jahen Fachrul Rezki Ph.D., UI, email: [jahen.fr@ui.ac.id](mailto:jahen.fr@ui.ac.id)

Tim berterima kasih atas masukan dari Prof. Budy Resosudarmo, Rimawan Pradiptyo Ph.D, Elan Satriawan Ph.D, Arianto Patunru, Ph.D, dan Prof. Arief Anshory Yusuf.

Tim penyusun dibantu oleh Naufal Muhammad Firdausyan.

**Supported by**



**Indonesian Regional  
Science Association**